



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAKA SAWALDI
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 100058

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 818.675.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/175 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 128.600.000
2. Tanah Seluas 1620 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 87.500.000
3. Tanah Seluas 140 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 185.000.000
4. Tanah Seluas 2569 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 1200 m2/175 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 75.075.000
6. Tanah Seluas 1620 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 87.500.000
7. Tanah Seluas 140 m2 di KLATEN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 185.000.000
8. Tanah Seluas 2569 m2 di GUNUNG KIDUL, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 384.500.000

1. MOBIL, TOYOTA HARTOP JEEP Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2005, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



3. MOTOR, YAMAHA MIO SOUL SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOBIL, HONDA ACCORD 2008 SEDAN Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
5. MOBIL, BMW BMW 3201 AT E90 Tahun 2006, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	52.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	547.082.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	1.802.257.000
III. HUTANG	Rp.	48.750.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.753.507.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.